



Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)

Sri Rahayu ¹⁾; Alfanisha Dewi Kanita ²⁾

^{1,2)} Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Email: ¹⁾ sriahayu@telkomuniversity.ac.id ; ²⁾ alfanishakant@gmail.com

How to Cite :

Rahayu, S., Kanita, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

ARTICLE HISTORY

Received [31 Oktober 2022]

Revised [22 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

KEYWORDS

*Laporan Keuangan Daerah,
Sistem Akuntansi Keuangan
Daerah Sistem Pengendalian
Intern, Teknologi Informasi*

*This is an open access article under
the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



ABSTRAK

Laporan keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberikan informasi pengambilan keputusan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaruh penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan OPD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 responden yang terdiri dari kepala bidang dan staf di bidang akuntansi dan keuangan pada 42 OPD. Model analisis data penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pada OPD Provinsi DKI Jakarta berpengaruh positif. Secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian intern menunjukkan pengaruh positif parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

ABSTRACT

Regional financial reports are an important factor that must be carried out by the government in the implementation of regional autonomy to provide decision-making information. This study is to find out how the application and the effect of the use of local government financial accounting systems, the use of information technology and control systems on the quality of the financial statements of OPD DKI Jakarta Province. This research is a quantitative research. The sample used in this study was 84 respondents consisting of heads of fields and staff in accounting and finance at 42 OPD. The data analysis model of this research is multiple linear regression using IBM SPSS version 26 software. The results show that the application of local government financial accounting systems, the use of information technology and internal control systems in the DKI Jakarta Provincial OPD has a positive effect. Simultaneously

significant to the quality of regional financial reports. The application of the local government financial accounting system and the partial use of information technology have no effect on the quality of regional financial reports. However, the internal control system shows a partial positive effect on the quality of regional financial reports.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah tentang kualitas laporan keuangan daerah merupakan suatu konsistensi dengan standar yang meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka pengelolaan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang tercantum didalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah tersebut. Laporan keuangan menjadi faktor penting untuk pemerintah yang wajib diperhatikan dalam penyajian laporan keuangannya dan menggambarkan sebuah media pemerintahan guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono, 2017). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) standar normatif yang wajib diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Karakter tersebut menjadi syarat normatif yang diperlukan laporan keuangan pemerintah daerah mampu melaksanakan kualitas yang dikehendaki, yaitu mampu dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan

Kualitas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk masing-masing daerah terbagi dalam 4 kategori, yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaannya sudah tidak ada kesalahan atau kekeliruan yang dianggap material; (2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam, tetapi tidak mempengaruhi kewajaran; (3) Tidak Wajar (TW) merupakan opini yang diberikan ketika hasil pemeriksaannya terbukti memuat banyak kesalahan dan kekeliruan yang bernilai material; dan (4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) merupakan opini yang diberikan karena pemeriksa tidak dapat meyakini laporan keuangan tersebut benar atau salah dengan alasan kurangnya bukti pada saat pemeriksaan laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara simultan dan parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

LANDASAN TEORI

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Setiawan & Kurniasih (2021) laporan keuangan adalah hasil dari sebuah proses akuntansi mengenai informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Serta laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang berkesinambungan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Entitas pelaporan merupakan bagian pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan keputusan peraturan perundang-undangan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban, berbentuk laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu (1) relevan; (2) dapat dipahami; (3) andal; (4) netral; (5) tepat waktu; (6) dapat dibandingkan; dan (7) lengkap.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian yang dimulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan serta elemen lainnya untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan entitas. Indikator dalam sistem pengendalian internal terdiri dari: (1) Kesesuaian Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Proses Pencatatan Akuntansi Di Satuan Kerja Sesuai dengan Prosedur Pencatatan Standar Akuntansi Keuangan Daerah; dan (3) Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauhari et al., (2021) dan Mbipi et al., (2021) yang menjabarkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

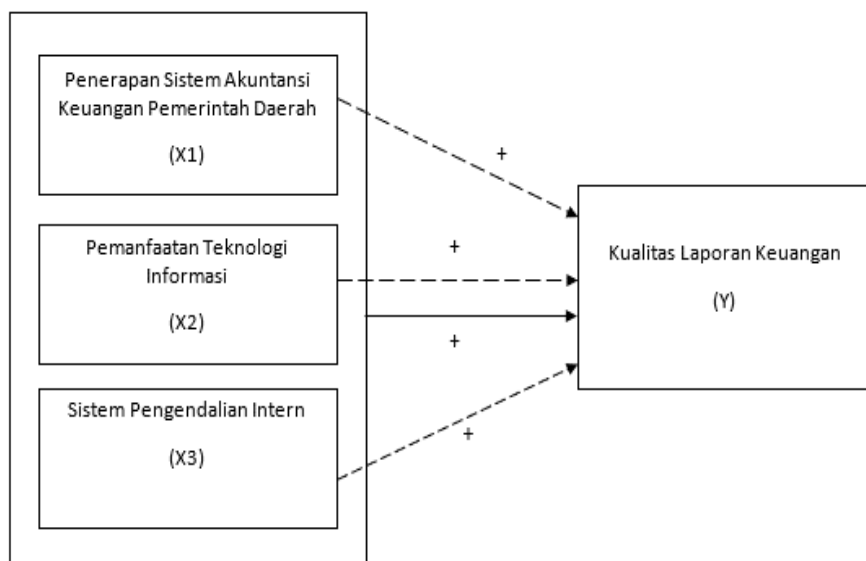
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi maka dijabarkan sebagai suatu teknik untuk menghimpun, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menyelidiki dan menyebarkan informasi. Oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan cara memaksimalkan teknologi informasi untuk menumbuhkan jaringan informasi manajemen serta proses kerja pemerintah secara sistematis. Menurut Koto (2019) terdapat delapan komponen utama teknologi informasi, yaitu: (1) Komputer yang Memadai; (2) Jaringan Internet yang Terpasang dan Terhubung; (3) Pemanfaatan Jaringan Internet; (4) Proses Akuntansi Secara Komputerisasi; (5) Pengelolaan Menggunakan *Software*; (6) Sistem Informasi yang Terintegrasi; (7) Tersedianya Jadwal Pemeliharaan; dan (8) Peralatan yang Telah Usang/Rusak Didata dan Diperbaiki. Manfaat teknologi informasi yaitu untuk mempermudah melakukan pekerjaan, ini menjadi dasar dibentuknya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi aktivitas yang ingin dikerjakan akan jauh lebih efisien. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2020) dan Mene et al., (2018) yang menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian *Intern*

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengawasan internal merupakan serangkaian proses yang terdiri dari kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan lain terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam hal memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi telah dijalankan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan guna kepentingan pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dalam Sistem Pengendalian Intern terdiri dari: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan. Pengendalian intern yang baik dapat dilihat dari hasil kualitas laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas pemerintahan. Pengendalian *intern* yang kurang baik dapat mengakibatkan sulitnya deteksi kecurangan pada proses akuntansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2020) dan Agustiningtyas (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari suatu kuesioner, maka dapat dilakukan pengujian instrumen penelitian dengan menggunakan uji validitas yang bertujuan untuk mengetahui bahwa instrumen telah dikatakan mampu mengukur valid tidaknya suatu pertanyaan dalam kuesioner dan penggunaan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen menghasilkan pengukuran yang konsisten. Karena dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis berganda, maka perlu adanya pengujian asumsi klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik meliputi: (1) Uji Normalitas; (2) Uji Multikolinearitas; (3) Uji Heteroskedastisitas; dan (4) Uji Autokorelasi. Setelah memperoleh hasil yang valid serta reliabel pada uji asumsi klasik, dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi: (1) Uji Simultan (Uji F); (2) Koefisien Determinasi Berganda (R^2); dan (3) Uji Parsial (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bentuk data yang berfungsi untuk memberikan gambaran akan karakteristik data yang telah dikumpulkan berdasarkan dari suatu sampel dan tanpa adanya analisis dan kesimpulan yang diberikan untuk penyajian variabel penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan daerah laporan keuangan. Penilaian atas tanggapan responden dilakukan dengan membuat kategori. Hasil uji statistik deskriptif dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Presentase	Kategori
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	6.300	5.734	91,02%	Sangat Baik
Pemanfaatan Teknologi Informasi	7.560	6.787	89,78%	Sangat Baik
Sistem Pengendalian Intern	5.460	4.901	89,76%	Sangat Baik
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	6.300	5.677	90,11%	Sangat Baik

Sumber: Data Diolah, 2022

Uji statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa hasil dari seluruh variabel pada

penelitian ini tergolong dalam kategori sangat baik karena persentase yang ditunjukkan berada pada interval $\geq 89\%$ - 100%.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	Sig.	Std. Error
(Constant)	26.177	9.947
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1)	.180	.117
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	.140	.072
Sistem Pengendalian Intern (X3)	.301	.103

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan pada hasil dari tabel 2 didapat nilai a (konstanta) sebesar 26,177, nilai koefisien regresi b_1 0,180, nilai b_2 0,140, nilai b_3 0,301 sehingga dapat dilihat dalam bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 26,177 + 0,180 X_1 + 0,140 X_2 + 0,301 X_3$$

Persamaan tersebut menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebas (X) naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya:

1. Nilai konstanta sebesar 26,177 artinya jika variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3), maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) juga akan mengalami peningkatan.
2. Nilai koefisien regresi 0,180 artinya jika Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) meningkat satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat
3. Nilai koefisien regresi 0,140 artinya jika Pemanfaatan Sistem Informasi (X2) meningkat satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat
4. Nilai koefisien regresi 0,301 artinya Sistem Pengendalian Intern (X3) meningkat satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) akan meningkat.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui mengetahui suatu pengaruh dari variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap suatu variabel tidak bebas (Y) signifikan atau tidaknya, maka dilakukan uji F. Hasil dari pengujian ini menggunakan software Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 26 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	224.817	3	74.939	6.350	.001 ^b
	Residual	944.171	80	11.802		
	Total	1168.988	83			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X1, X2, X3						

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan output pada tabel 3.3 maka didapat nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$. Dikarenakan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Untuk mengetahui koefisien korelasi berganda antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), maka menggunakan analisis korelasi berganda (R). Dengan menggunakan *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 26, maka dihasilkan output estimasi koefisien korelasi sebagai berikut:

Tabel 4. Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R square	Adjusted R square	Std Error of the estimate
1	.439 ^a	.192	.162	3.43542

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 4.35 maka diperoleh nilai Adjusted R Square = 0.162 atau 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 16,2% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), nilai koefisien determinasi ini terbilang rendah. Sedangkan nilai sisa sebesar 83,8% ($100\% - 16,2\%$) merupakan kontribusi dari hasil selain variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3).

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Analisis pengaruh secara parsial digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh yang dimiliki masing-masing variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Dengan bantuan program *software Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 26 maka diperoleh nilai uji parsial (uji t) sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.
-------	----------------	--------------	---	------

	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	26.177	9.947		2.632	.010
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1)	.180	.117	.160	1.545	.126
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	.140	.072	.199	1.949	.055
Sistem Pengendalian Intern (X3)	.301	.103	.299	2.927	.004

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,126 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,126 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk hipotesis kedua yaitu variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,055 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ atau $0,055 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang artinya Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk hipotesis ketiga yaitu variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ atau $0,004 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau $0,001 < 0,05$. Dikarenakan hasil nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern dalam entitas, dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik pada OPD Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pada *Adjusted R Square* memiliki nilai sebesar 0,162 atau 16,2%. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) memberikan pengaruh sebesar 16,2% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sedangkan nilai sisa sebesar 83,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Darwanis (2018), Ismail et al. (2021), dan Novi (2021) mengungkapkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk hipotesis pertama yaitu variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,126 lebih besar dari 0,05 atau $0,126 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Artinya jika penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah semakin baik, belum tentu diikuti dengan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh skor rata-rata sebesar 91,02% menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada OPD di Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong sangat baik. Walaupun penerapan sistem akuntansi keuangan daerah telah berada dalam kategori sangat baik secara keseluruhan namun jika dikaitkan dengan hasil pengujian secara parsial, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu OPD Provinsi DKI Jakarta dianggap perlu untuk melakukan pelatihan serta sosialisasi untuk para staf serta kepala bidang akuntansi dan keuangan mengenai pentingnya basis akuntansi akrual yang diterapkan dengan baik dalam instansi guna dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika & Fadilah (2020) dan Indrayani & Widiastuti (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan pada hasil perhitungan untuk hipotesis kedua yaitu variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,55 lebih besar dari 0,05 atau $0,55 > 0,05$. Sehingga, H_0 diterima yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Artinya jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik, belum tentu diikuti dengan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan baik pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel pemanfaatan teknologi informasi memperoleh skor rata-rata sebesar 89,78% menandakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada OPD di Provinsi DKI Jakarta sudah tergolong sangat baik. Walaupun pemanfaatan teknologi informasi telah berada dalam kategori sangat baik secara keseluruhan namun jika dikaitkan dengan hasil pengujian secara parsial, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu OPD Provinsi DKI Jakarta dianggap perlu untuk memiliki jadwal pemeliharaan secara terarur untuk dapat memudahkan pengerjaan tugas menyusun laporan keuangan pemerintah. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi hasil dari kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al. (2018) dan Apriansyah et al. (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Sistem Pengendalian Intern (X3) diperoleh hasil untuk perhitungan hipotesis Sistem Pengendalian Intern (X3), yaitu nilai signifikansi sebesar 0,004, nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau $0,004 < 0,05$. Sehingga H_0 ditolak yang memiliki arti bahwa secara parsial variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) pada OPD di Provinsi DKI Jakarta. Artinya semakin baik tingkatan Sistem Pengendalian Intern, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang akan dihasilkan. Pemerintah daerah telah mampu merancang, menjalankan serta memelihara Sistem Pengendalian Intern dengan baik untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercayai. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jika semakin baik sistem

pengendalian internnya dalam entitas maka akan semakin baik pula laporan keuangan yang akan dihasilkan dikarenakan sejak dijalkannya sistem pengendalian intern dengan baik dan benar dalam suatu entitas dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menyusun laporan keuangan daerah. Hal penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alamsyah et al. (2018), Agustiningtyas et al. (2020) dan Marisa et al. (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang dilihat dari pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk dalam kategori sangat baik; (2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di OPD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021; dan (3) Secara parsial pengaruh variabel penelitian terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta; (2) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta; dan (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik, yaitu Sistem Pengendalian Intern pada OPD Provinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari indikator Lingkungan Pengendalian yang masih terdapat beberapa responden menjawab ragu. Sebaiknya, instansi memberikan pelatihan kepada para pimpinan dan karyawan untuk dapat memahami serta menerapkan standar etika yang diperlukan dalam instansi. Standar etika dianggap perlu dipahami dan diterapkan dalam instansi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas agar tidak adanya kepentingan pribadi yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, dalam struktur organisasi pada instansi harus tergambar jelas mengenai bagaimana pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas tersebut, agar dapat fokus dan tidak ada kerancuan dalam menyelesaikan tugas menyusun laporan keuangan dengan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*,
- Agustiningtyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*.
- Alamsyah, R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada

- Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota. *Majalah Ilmiah UNIKOM.*
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *JAR: Jambi Accounting Review.*
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA).*
- Fathia, N. (2020). *Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.*
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia.*
- Ismail, N., Marselina, A., & Loda, E. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pengendalian Internal, Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. *Media Binawakya.*
- Jauhari, H., Dewata, E. D., & Suhairi Hazisma. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi.*
- Koto, A. N. S. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Sebagai Variabel Intervening.*
- Marisa, Y., Defrizal, & Dunan, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan. *Jurnal Manajemen Visionist.*
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review).*
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi.*
- Mustika, M., & Fadilah, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Seminar Penelitian Sivitas Akademik Unisba.*
- Novi, S. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Aconomic, Accounting Scientific Journal.*
- Setiawan, D., & Kurniasih, N. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Dampak Dari Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Fakulal Ekonomi UNIBBA.*
- Utari, N. P., Datrini, L. K., & Lestari, N. L. P. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan.*
- Wardani, D., Ayem, S., & Ningrum, T. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam. *Seminar Multimedia & Artificial Intelligence.*